



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendekatan pembangunan yang tengah dilakukan selama ini dianggap masih sangat bias gender dan belum mempertimbangkan manfaat dan dampak pembangunan yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Hal itu memberikan kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.

Kondisi ini tentunya tidak selaras dengan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut GBHN 1999 yang bertekad akan meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diimbangi oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Penyetaraan juga diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang, Instruksi Presiden dan aturan-aturan pelaksanaannya.

Salah satu strategi pembangunan dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Guna mendukung strategi pembangunan tersebut diperlukan data statistik yang berwawasan gender dan gambaran peran perempuan diberbagai bidang kehidupan. Untuk itu, disusunlah Statistik dan Analisis Gender sebagai langkah awal dalam formulasi perencanaan pembangunan yang berwawasan gender.

1.2 Tujuan

Penyusunan buku ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan gender secara menyeluruh yaitu mengidentifikasi kesenjangan gender, peran, akses, kontrol dan manfaat, mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender,



menghimpun masalah kesenjangan gender dan upaya pemecahannya serta mengidentifikasi langkah-langkah intervensi/tindakan yang diperlukan. Diharapkan dengan tersusunnya buku ini, pemerintah daerah dapat menentukan formulasi penetapan skala prioritas pembangunan kepada masyarakat terutama pembangunan yang berwawasan gender.

1.3 Sumber Data

Data yang mendukung Statistik dan Analisis Gender ini adalah data registrasi dari dinas instansi dan juga lembaga masyarakat tahun 2020, yang dilengkapi data-data dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional dan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2020 baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Buku ini memuat bab-bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang, tujuan, sumber data dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Daerah, memuat gambaran umum Kabupaten Rembang meliputi letak geografis, sejarah, sosial budaya dan perekonomian daerah.

Bab III Demografi, menyajikan gambaran penduduk meliputi karakteristik penduduk menurut jenis kelamin serta karakteristik penduduk menurut kelompok umur.

Bab IV Pendidikan, menyajikan gambaran tentang pendidikan penduduk meliputi angka buta huruf, partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan siswa putus sekolah.



Bab V Kesehatan, menyajikan gambaran kondisi kesehatan penduduk meliputi Imunisasi, Status Gizi, Angka Kematian bayi dan angka kematian anak serta kematian ibu.

Bab VI Kegiatan Ekonomi, menyajikan gambaran kondisi perekonomian meliputi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan pengangguran, lapangan dan status pekerjaan dan upah/gaji.

Bab VII Sektor Publik, menyajikan gambaran partisipasi perempuan di sektor publik yang meliputi partisipasi perempuan dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif yang meliputi partisipasi perempuan dalam partai politik serta jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut eselonisasi berdasarkan jenis kelamin.

Bab VIII Kekerasan Terhadap Perempuan, menyajikan gambaran kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Bab IX Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menyajikan perkembangan IPM, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG).

Bab X Penutup

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

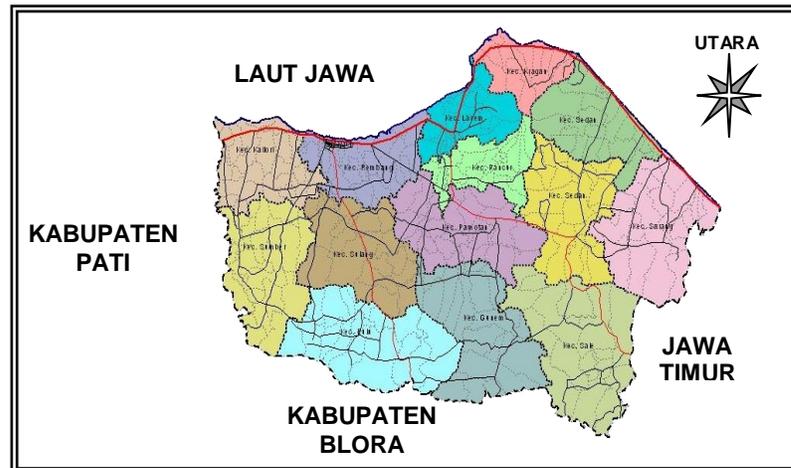
2.1. Kondisi Geografis Kabupaten Rembang

Wilayah Kabupaten Rembang terletak pada koordinat 111^o.00' – 111^o.30' Bujur Timur dan 6^o.30' – 7^o.60' Lintang Selatan dan diapit oleh batas – batas wilayah Sebelah Utara Laut Jawa, Sebelah Selatan Kabupaten Blora, Sebelah Barat Kabupaten Pati, Sebelah Timur Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Rembang merupakan suatu wilayah yang sebagian besar merupakan daerah pantai yang membujur sepanjang pantai utara Jawa, kurang lebih 60 Km. Selain itu sebagian wilayah selatan masuk dalam wilayah administrasi Perhutani dengan komoditi utamanya hutan jati dan merupakan daerah pegunungan.

Ibukota Kabupaten Rembang terletak di Kecamatan Rembang dengan luas wilayah 101.408 Ha. Secara administratif Kabupaten Rembang terbagi dalam 14 Kecamatan dan terdiri dari 287 Desa dan 7 Kelurahan.

Gambar 2.1. Wilayah Kabupaten Rembang





Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang (63,04 %) berada pada ketinggian 0-100 meter diatas permukaan air laut. Sebesar 33,89 % berada pada ketinggian 101-500 meter dan hanya 3,07 yang berada di atas 500 m. Kondisi topografi di Kabupaten Rembang berelief datar, pegunungan dan berbukit-bukit dengan kemiringan lahan 0–2 % seluas 46,38 %, kemiringan 3–15 % seluas 34,35 %, kemiringan 16–40 % seluas 13,97 %, kemiringan lebih dari 40 % seluas 4,72% dari keseluruhan luas wilayah. Kondisi ini membuat wilayah Kabupaten Rembang beriklim tropis dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebesar 197 mm/bulan dan terendah pada bulan Juli sebesar 35 mm/bulan dan tersebar tidak merata.

Secara geologis, jenis tanah terbanyak yang terdapat di Kabupaten Rembang adalah tanah mediteran merah-kuning campur grumosol di bagian timur dari pantai sampai masuk ke selatan, dengan prosentase 45 %. Jenis tanah ini sesuai untuk sawah, tegalan dan lahan terbangun. Berbagai jenis tanah lainnya adalah tanah alluvial meliputi sekitar 10 %, tanah regosol meliputi area seluas 5 %, tanah andosol meliputi area seluas 8 %, tanah grumosol sebesar 32 %, dari seluruh luas wilayah kabupaten.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang adalah berupa tanah kering yang terdiri dari tanah pekarangan/bangunan, tegalan, padang rumput, tambak, kolam, rawa, hutan, perkebunan, tanah kosong dan lainnya.

2.2. Sejarah Kabupaten Rembang

Sekitar Tahun Saka 1336, datanglah orang Campa Banjarmati sebanyak delapan orang yang pandai membuat gula tebu. Orang-orang Campa itu pindah dari negerinya untuk membuat gula tebu. Mereka dipimpin oleh Kakek Pow le Din, berangkat menyeberang lautan menuju ke barat hingga mendarat disekitar sungai dimana kanan kirinya ditumbuhi pohon bakau yang selanjutnya tanah itu



dijadikan pertegalan dan pekarangan serta perumahan dan perkampungan. Kampung tersebut dinamakan Kabongan berasal dari kata "BAKAU" menjadi "Ka-Bong-An" (Kabongan). Pada suatu hari saat fajar menyising pada bulan waisaka orang-orang mulai "Ngerembang" (mbabat; memangkas) tebu. Sebelum ngerembang tebu dimulai terlebih dahulu upacara suci sembahyang dan semedi di tempat tebu serumpun, yang akan dipangkas, setelah itu dipangkaslah dua batang tebu yang dinamakan "Tebu Pengantin". Upacara pemangkasan tebu tersebut dinamakan "Ngreembang Sakawit" .

Dari kata ngreembang inilah kemudian menjadi kata "Rembang" nama kota Rembang yang sekarang ini. Menurut sahibul hikayat dengan nama samaran mbah guru, upacara "Ngreembang sakawit" dilaksanakan pada hari Rabo legi, saat dinyanyikan kidung minggu Kasada bulan Waisaka tahun Saka 1337 dengan candra sengkala : Sabda Tiga Wadha Isvara.

Rembang sudah dikenal sebagai daerah pelabuhan dan salah satu pusat pembuatan kapal pada masa kerajaan Demak. Sebelum abad ke 17 pada umumnya wilayah-wilayah di pantai utara Jawa Tengah terdiri dari kadipaten-kadipaten yang diperintah oleh seorang adipati/bupati. Kekuasaan-kekuasaan terhadap wilayah kadipaten/kabupaten inipun akan turun menurun kepada adipati/bupati berikutnya yang sering masih turunan bupati sebelumnya.

Namun semenjak makin melemahnya kekuasaan raja Mataram dan pengaruh VOC (serikat dagang dari Belanda) yang semakin kuat, serikat dagang ini sering mempengaruhi proses suksesi penguasa-penguasa kabupaten-kabupaten di Jawa, khususnya pantai utara Jawa. Oleh karena itu sering terjadi beberapa kadipaten diperintah oleh bupati yang diangkat oleh VOC demi mengamankan kepentingannya. Sering adipati-adipati itu bukan dari keturunan adipati lokal sebelumnya melainkan dari luar kabupaten. Pengaruh ini menjadi semakin besar ketika pada tahun 1677 VOC mendapatkan imbalan dari



raja Amangkurat II atas keberhasilannya membantu kerajaan Mataram memadamkan perlawanan Trunajaya. Atas keberhasilannya membantu menumpas perlawanan Trunajaya tersebut, maka VOC mendapatkan imbalan sebagai berikut :

- VOC mengakui Amangkurat II sebagai raja Mataram
- VOC boleh berdagang dengan bebas di wilayah kerajaan Mataram dan membuat pelabuhan di Rembang
- Pemasukan barang-barang VOC ke Mataram tidak dikenakan cukai
- Karawang dan sebagian Priangan diserahkan kepada VOC
- Kota Semarang diberikan kepada VOC
- Pantai-pantai di seluruh Jawa digadaikan kepada VOC dan ongkos perang dibayar oleh Amangkurat II.

Merujuk buku Carita (sejarah) Lasem pada awal abad ke 18 pada dasarnya Kabupaten Rembang telah berada di bawah pengaruh kekuasaan VOC. Di Kabupaten Rembang (Khuta Rembang) VOC tidak hanya memiliki seorang bupati yang setia tetapi juga sejumlah pasukan dan markas tentara (tangsi). Tangsi VOC ini berada di Karanggeneng menghadap Teluk Cepluk (kemungkinan Muara kali Karanggeneng sekarang). Bahkan Kabupaten Rembang merupakan satu titik kepanjangan tangan kekuatan VOC di Jepara dan Semarang untuk mengawasi kabupaten Lasem yang berada di sebelah timurnya. Pengaruh itu semakin kuat ketika pada tahun 1743, Rembang menjadi salah satu wilayah yang diserahkan oleh Mataram kepada VOC, termasuk hak mengangkat pejabat administrasi setempat.

2.3. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Rembang

Sebagai daerah yang memiliki pantai, daratan, hutan dan pegunungan, penduduk Kabupaten Rembang memiliki beraneka ragam mata pencaharian.



Lapangan pekerjaan yang menyerap paling banyak tenaga kerja adalah di bidang pertanian, kehutanan, perburuhan dan perikanan dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan semakin besarnya kebutuhan pokok. Kabupaten Rembang masih menghadapi masalah yang cukup pelik dibidang sosial dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Penduduk miskin ini dapat memancing permasalahan rawan sosial dimana salah satu diantaranya adalah meningkatnya angka kriminalitas.

Peningkatan jumlah penduduk miskin yang sangat besar justru terjadi di wilayah pedesaan. Rendahnya tingkat ekonomi menyebabkan rendahnya posisi tawar dalam berbagai aktivitas pembangunan masyarakat, masyarakat inipun menjadi semakin terpinggirkan. Kegiatan organisasi yang berbasis kemasyarakatan, inovasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha dan ketrampilan sebagai penggerak ekonomi juga menjadi jauh dari jangkauan. Organisasi berbasis kemasyarakatan yang ada, yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat banyak justru didominasi oleh pemimpin informal dan juragan di desa, masyarakat umum dan buruh justru kurang berperan aktif dalam kegiatan yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi mereka. Sebagaimana tangga kebutuhan Maslow, kebutuhan dasarlah yang masih menjadi prioritas bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah tersebut.



BAB III DEMOGRAFI

Data demografi (kependudukan) merupakan data pokok yang dibutuhkan oleh konsumen baik pemerintah maupun swasta sebagai bahan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik memerlukan data penduduk, karena penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan. Penduduk di Kabupaten Rembang dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan, namun demikian peningkatannya tidak signifikan karena pertumbuhan penduduknya dalam tiga tahun terakhir sedikit mengalami kenaikan. Hal ini bisa dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Penduduk Kabupaten Rembang Dirinci Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 – 2021

Tahun	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	Sex Ratio	Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6
2016	314.079	312.057	626.136	99,36	0,81
2017	316.705	314.180	630.885	99,20	0,76
2018	319.170	316.626	635.976	99,20	0,80
2019	320.278	317.910	638.188	99,26	0,85
2020	320.740	324.593	645.333	101,20	1,12
2021	322.013	325.753	647.766	101,16	0,47

Sumber : BPS Kabupaten Rembang Tahun 2016 - 2021

3.1 Karakteristik Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki selama lima tahun terakhir di Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

Pada tahun 2021, rasio jenis kelaminnya (sex ratio) sebesar 101,16 yang berarti bahwa setiap 10.000 penduduk perempuan terdapat 10.160 penduduk laki-laki.



Dari tabel 3.1 terlihat angka rasio jenis kelamin selama lima tahun terakhir mendekati hampir 100 sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Rembang hampir berimbang jika dibandingkan dengan penduduk perempuan.

3.2 Karakteristik Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Rembang disajikan dalam tabel 3.2 berikut ini.

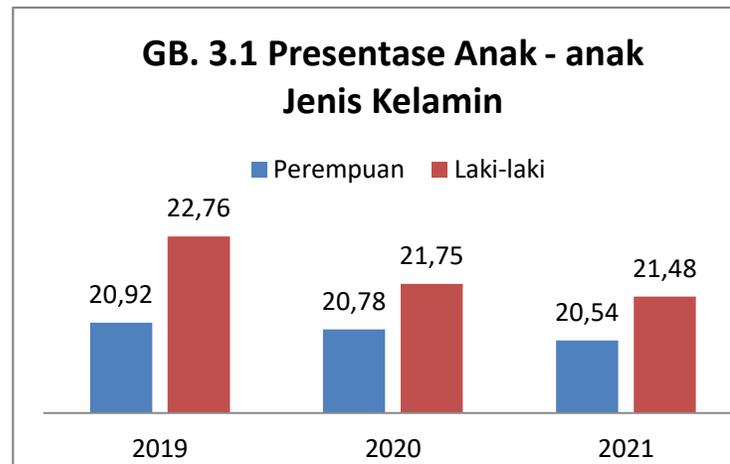
Tabel 3.2. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Rembang Tahun 2019 – 2021(persen)

Klmpk Umur	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1	2	3	4	5	6	7
0 - 4	7,14	6,61	7,21	7,44	7,13	7,36
5 - 9	7,68	7,15	6,73	7,01	6,66	6,93
10 – 14	7,76	7,16	6,84	7,28	6,76	7,18
15 – 19	8,45	7,93	7,38	7,82	7,26	7,71
20 – 24	8,86	8,15	7,46	7,81	7,30	7,65
25 – 29	7,69	7,45	7,67	7,80	7,58	7,72
30 – 34	7,21	7,35	8,10	7,91	8,03	7,86
35 – 39	7,02	7,34	7,60	7,60	7,56	7,60
40 – 44	7,13	7,35	7,88	7,83	7,85	7,84
45 – 49	7,08	7,22	7,20	7,20	7,23	7,25
50 – 54	6,64	6,94	6,64	6,52	6,67	6,58
55 – 59	5,91	5,82	5,87	5,76	5,99	5,86
60 – 64	4,43	4,25	4,94	4,75	5,08	4,86
65 +	6,92	9,22	8,44	7,18	8,85	7,52
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

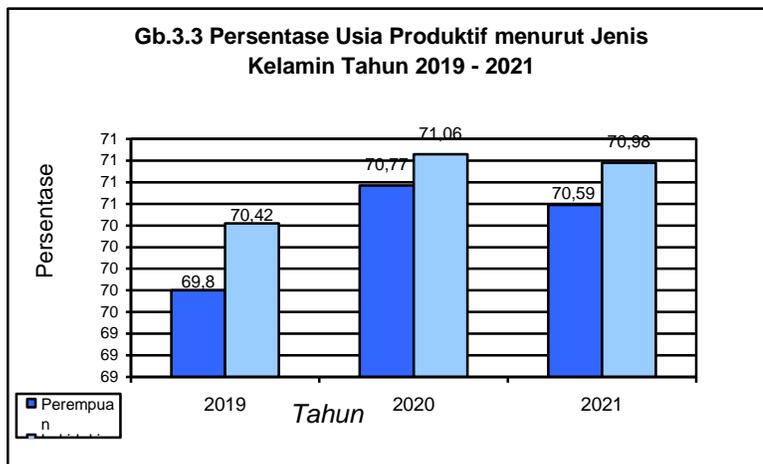
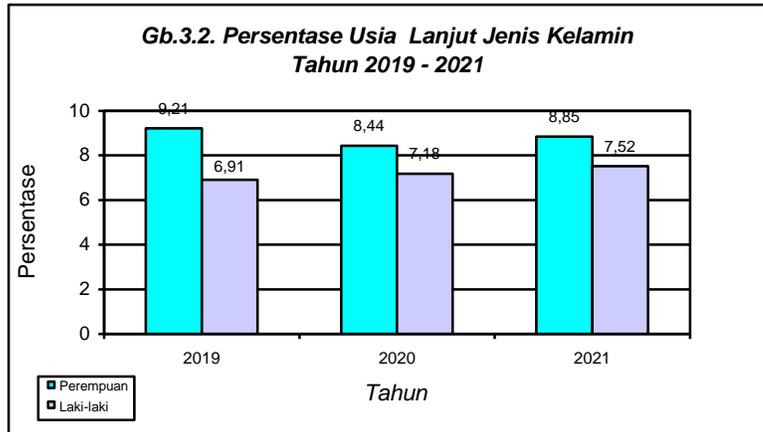
Sumber : Diolah dari data Susenas tahun 2019 - 2021



Berdasarkan penggolongan kelompok umur penduduk di atas, maka dapat dihitung besarnya angka beban tanggungan, yaitu perbandingan penduduk yang berumur 0 -14 tahun dan di atas 65 tahun (usia tidak produktif) dengan penduduk yang berumur 15 – 64 tahun (usia produktif). Dari tabel 3.2 setelah dihitung menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang pada tahun 2021 angka beban tanggungan sebesar 41,64 persen untuk penduduk perempuan dan 37,11 persen untuk penduduk laki-laki.



Pada tahun 2019 sampai 2021 persentase penduduk di bawah 15 tahun (anak-anak) perempuan lebih kecil jika dibandingkan anak laki-laki, hal ini bisa dilihat pada gambar 3.1.



Pada tahun 2021 persentase perempuan diatas 65 tahun (lanjut usia) lebih besar dibandingkan laki-laki, hal ini bisa dilihat pada gambar 3.2. Sedangkan pada gambar 3.3 dapat dilihat untuk usia produktif (15–64 tahun) pada tahun 2021 persentase laki-laki dan perempuan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020.



**Tabel. 3.3 Jumlah anak usia 0-18 tahun Kabupaten Rembang
Tahun 2019 - 2021**

Jenis Kelamin	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4
Perempuan	79.220	78.441	85.481
Laki-laki	85.023	84.156	91.409
Jumlah	164.243	162.597	176.890

Sumber : Data Dindukcapil Kabupaten Rembang

Data Dindukcapil Kabupaten Rembang dapat dilihat bahwa jumlah anak di Kabupaten Rembang 162.597 pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 176.890 pada tahun 2021. Dimana jumlah anak laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan.

3.3 Karakteristik Penduduk Menurut Status Perkawinan

Dalam tiga tahun terakhir status perkawinan penduduk Kabupaten Rembang yang berumur 10 tahun ke atas dapat dilihat pada table 3.3 di bawah. Dari tabel tersebut terlihat bahwa perempuan yang bercerai (baik cerai hidup maupun cerai mati) persentasenya lebih tinggi bila dibandingkan dengan laki-laki.

Data Dindukcapil tahun 2021 menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan yang berstatus cerai hidup lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini kemungkinan disebabkan karena laki-laki lebih cepat untuk memutuskan kawin lagi dari pada perempuan. Dapat pula dilihat pada tahun 2021 secara umum perempuan yang pernah kawin sebesar 62,19 persen dan laki-laki 61,85 persen, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya baik laki-laki maupun perempuan mengalami sedikit peningkatan.



Tabel 3.4. Persentase Penduduk Berumur 10 tahun ke atas Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Rembang Tahun 2019 – 2021

Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Tahun		
		2019	2020	2021
1	2	4	5	6
Belum kawin	Perempuan	32,28	33,86	20,90
	Laki-laki	42,44	43,83	33,21
Kawin	Perempuan	55,99	55,22	62,19
	Laki-laki	54,61	53,36	61,85
Cerai Hidup	Perempuan	2,06	2,11	1,08
	Laki-laki	1,15	1,21	0,67
Cerai Mati	Perempuan	9,65	8,79	4,54
	Laki-laki	1,79	1,18	0,90

Sumber : Data DINDUKAPIL Tahun 2019-2021

3.4 Karakteristik Penduduk Menurut Formasi Kepala Rumah tangga

Salah satu kondisi yang menunjukkan kemandirian perempuan adalah fungsi perempuan sebagai kepala rumahtangga. Kondisi ini sekaligus juga menaikkan posisi tawar mereka (*bargaining position*) dalam pengambilan keputusan dalam suatu keluarga.

Dari tabel 3.4 di atas terlihat pada tahun 2021 sebagian besar rumah tangga masih dikepalai oleh laki-laki, sebesar 18,45 persen rumah tangga di kepalai oleh perempuan artinya setiap 100 rumah tangga dikepalai oleh sekitar 18 orang perempuan dan sekitar 81 dikepalai oleh laki-laki. Masih adanya perempuan sebagai kepala rumahtangga dimungkinkan karena banyak perempuan muda yang bekerja membentuk rumah tangga tunggal (*single head household*) atau perempuan yang berstatus janda ditinggal cerai (hidup/mati).



Tabel 3.5. Persentase Kepala Rumah tangga Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang Tahun 2019 - 2021

Jenis Kelamin	Tahun		
	2019	2020	2021
1	2	3	4
Perempuan	16,55	18,10	18,45
Laki-laki	83,46	81,90	81,55
JUMLAH	100,00	100,00	100,00

Sumber : DATA DINDUKCAPIL tahun 2019 - 2021

3.5 Karakteristik Penduduk Menurut Pola Perkawinan

Umur perkawinan pertama perempuan pernah kawin akan berpengaruh terhadap tingkat kelahiran, yang secara tidak langsung juga akan berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam ber KB. Disamping itu umur perkawinan pertama perempuan juga merupakan salah satu tolok ukur kesehatan perempuan pada saat hamil dan melahirkan. Semakin muda umur perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak pada saat hamil ataupun saat melahirkan. Begitu juga sebaliknya semakin tua umur perkawinan pertama semakin besar pula resiko pada saat hamil dan saat melahirkan.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya harus juga di perhatikan adalah jarak kelahiran anak dan jumlah anak yang dilahirkan. Jarak kelahiran anak yang terlalu dekat akan juga berpengaruh pada kondisi kesehatan ibu, mengingat alat reproduksi yang sebetulnya belum siap untuk dibuahi karena masih dalam proses pemulihan sudah harus menerima beban lagi dengan adanya janin didalamnya.



**Tabel 3.6 Data Usia Perkawinan di Kabupaten Rembang
Tahun 2019 s/d 2021**

Tahun	Laki-laki				Perempuan			
	-19	19-21	21-30	30+	-16	16-21	21-30	30+
2019	29	1005	2175	1035	61	1177	2297	792
2020	6	137	1370	579	22	674	1044	353
2021	25	705	3194	857	116	1504	2615	547

Sumber : Diolah dari data Kementerian Agama Kab Rembang 2021

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa pada tahun 2020 masih ada perempuan yang melangsungkan perkawinan pertama pada usia anak , -16 tahun sebesar 22 orang sedangkan pada tahun 2021 perkawinan pertama pada usia -16 tahun sebanyak 116 orang dan usia 16-21 tahun pada tahun 2020 sebanyak 674 orang pada tahun 2021 meningkat mejadi 1504 orang. Sedangkan untuk laki-laki yang melangsungkan pernikahan dibawah usis -19 tahun pada tahun 2020 sebanyak 6 orang pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 25 orang dan usia 19-21 Tahun pada tahun 2020 sebanyak 137 orang menjadi 705 orang pada tahun 2021.

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan normal menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan



perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Disamping usia perkawinan yang sangat berpengaruh pada kesehatan ibu dan anak, beban kerja yang sangat berat bagi perempuan dan kondisi ekonomi yang sangat minim dalam keluarga tersebut tentunya juga sangat mempengaruhi.



BAB IV PENDIDIKAN

Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Oleh karena itu pemerintah sangat serius menangani bidang pendidikan sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah program pendidikan gratis pada tingkat dasar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu upaya lainnya dengan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan Fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah dan tidak bersekolah lagi. Masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan Menengah seperti SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A/setara SD, Paket B/setara SMP dan Paket C/setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kemendikbud, Kemenag, Instansi Lain maupun Instansi swasta.



Tabel 4.1 Presentase Penduduk Usian 5 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan Tahun 2021

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
Laki-laki	4,84	9,81	4,97	4,19	76,20	100,00
Perempuan	9,59	9,83	4,05	5,51	71,02	100,00
Kelompok Pengeluaran						
40Persen Terbawah	9,61	10,92	4,32	5,22	69,93	100,00
40Persen Tengah	6,50	8,92	5,02	3,95	75,61	100,00
20Persen Teratas	4,01	9,42	3,88	5,90	76,78	100,00
Kabupaten Rembang	7,23	9,82	4,51	4,85	73,59	100,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021

Pada tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk Rembang usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 4,84 persen penduduk laki-laki dan 9,59 persen penduduk perempuan, penduduk yang tidak sekolah 76,20 persen penduduk laki-laki dan 71,02 persen penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk Rembang usia 5 tahun ke atas yang tidak/ belum pernah bersekolah dan tidak bersekolah lagi. Menunjukkan kesetaraan bagaimana penduduk perempuan lebih banyak yang belum pernah bersekolah dan untuk presentase penduduk yang masih sekolah SD, SMP dan SMA antara laki-laki dan perempuan perbandingan sudah merata..



4.1 Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APSK) dan Angka Partisipasi Sekolah Murni (APSM) baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA/SMK merupakan salah satu indikator tentang keberhasilan pemerintah dalam bidang peningkatan pelayanan pendidikan.

Di Kabupaten Rembang angka partisipasi sekolah dari tahun ke tahun semakin meningkat sejak tahun 2006. Peningkatan ini terjadi karena semakin besarnya komitmen Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan. Program-program pemerintah yang strategis ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam menikmati layanan pendidikan yang dibutuhkan, sehingga anak-anak usia sekolah dapat bersekolah sesuai dengan layanan yang diberikan.

Program strategis itu antara lain, Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI dan SMP/MTs., dan Program Sekolah Gratis di Kabupaten Rembang pada jenjang Pendidikan Dasar. Kenaikan angka partisipasi ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019 – 2021

No.	Pendidikan	2019	2020	2021
1.	SD/MI	96,67	96,54	96,34
2.	SMP/MTS	81,12	82,34	82,13
3.	SMA/MA	55,34	56	55,47

Sumber : Susenas 2019– 2021

Meski belum dapat mencapai angka 100 persen di masing-masing kelompok usia, peningkatan APM di Kabupaten Rembang menunjukkan ke arah



yang positif. Pada gambar 4.2 menunjukkan APM SD/MI di Kabupaten Rembang tahun 2021 sebesar 96,34 persen, sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 96,54 persen. Hal ini berarti bahwa terdapat 96,34 persen penduduk Rembang yang berusia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang sekolah dasar (SD). Atau tepatnya bahwa murid SD yang berumur 7-12 tahun sebanyak 96,34 persen.

APM SMP/MTs di Kabupaten Rembang tahun 2021 sebesar 82,13 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 82,34 persen. Artinya bahwa terdapat 82,13 persen penduduk Rembang yang berusia 13-15 tahun yang terserap sebagai murid menengah pertama dan sisanya dapat terserap dijenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah atas, atau bahkan tidak sekolah lagi.

Salah satu kendala yang menyebabkan APM SD/MI di Kabupaten Rembang belum mencapai angka 100, dikarenakan adanya fenomena mendaftarkan anak sekolah pada usia yang lebih muda. Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan mensyaratkan usia tertentu (7 tahun untuk masuk SD) sebagai prasyarat wajib penerimaan siswa baru di sekolah negeri, dan usia 3 tahun sebagai syarat minimal umur masuk pra sekolah kelompok bermain.

Capaian APM SMP/MTs dan APM SMA/MA yang belum dapat menembus angka 90 persen disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal pada umumnya disebabkan rendahnya motivasi individu untuk bersekolah di jenjang yang lebih tinggi. Menganggap mengenyam pendidikan sudah cukup hanya dengan mampu membaca dan menulis. Sementara faktor eksternal lebih dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya.



4.2 Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan

Salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia adalah dengan melihat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Intelektual seseorang pada umumnya akan semakin meningkat seiring dengan bertambah tingginya tingkat pendidikan seseorang. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Hampir semua negara berkembang menghadapi masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan. Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga selain bisa memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji/upah yang sesuai, tingginya tingkat pendidikan juga dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat. Gambaran kualitas SDM Indonesia dilihat dari pendidikan yang ditamatkan yang disajikan pada gambar 4.3.



Tabel 4.3 Presentase Penduduk 15 Tahun Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang dimiliki, Tahun 2021

Karakteristik	Tidak Punya Ijazah SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jenis Kelamin					
Laki-laki	14,22	30,81	25,58	29,40	100,00
Perempuan	21,39	30,33	24,64	23,64	100,00
Kelompok Pengeluaran					
40 Persen Terbawah	20,87	31,09	26,98	21,06	100,00
40 Persen Tengah	16,93	32,29	25,65	25,13	100,00
20 Persen Teratas	13,92	26,30	20,58	39,20	100,00
Kabupaten Rembang	17,84	30,57	25,11	26,49	100,00

Dari gambar 4.3 diatas terlihat bahwa persentase tertinggi adalah penduduk yang tamat SD/MI sebesar 30,57 persen, diikuti tamat SMP/MTs sebesar 25,11 persen, dan sebesar 26,49 persen tamat SMA/MA. Sedangkan persentase penduduk Rembang usia 15 tahun ke atas yang tidak punya ijazah SD atau belum pernah mengenyam pendidikan sebesar 17,84 persen .



BAB V KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara murah, mudah dan merata. Dengan adanya program tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik dan optimal. Meskipun sasaran akhir dari upaya pembangunan kesehatan adalah seluruh lapisan masyarakat, namun secara operasional dipilih menurut golongan secara bertahap. Hal ini dilakukan mengingat kepentingan yang mendesak sesuai prioritas dan ketersediaan dana, sarana dan prasarana.

Kesehatan merupakan faktor penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Adapun indikator yang digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan suatu negara adalah mortalitas, morbiditas dan status gizi. Mortalitas terdiri dari 4 indikator yaitu Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Harapan Hidup (AHH).

Isu jender dalam bidang kesehatan sangat terkait erat dengan terciptanya kesetaraan dan keadilan jender dalam bidang pelayanan kesehatan dan program/kebijakan kesehatan.

Upaya perbaikan kesehatan di kabupaten Rembang sejauh ini telah diarahkan untuk dapat meningkatkan mutu dan jumlah pelayanan kesehatan yang makin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Seberapa besar perempuan di kabupaten Rembang telah memperoleh hak-haknya di bidang pelayanan kesehatan dapat disampaikan sebagai berikut :

5.1 Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan antara lain menambah ketersediaan fasilitas kesehatan dan sarana kesehatan. Meskipun kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan makin terpenuhi, namun



upaya untuk meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan masih terus dilakukan. Untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat, pemerintah kabupaten Rembang telah membangun dan memperbaiki Puskesmas dan Rumah Sakit Umum.

Tabel. 5.1. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Rembang Tahun 2019 - 2021

No	Fasilitas Kesehatan	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1.	Rumah Sakit	3	3	3
2.	Puskesmas	17	17	17
3.	Puskesmas Pembantu	69	69	69
4.	PKD	168	168	168
5.	Posyandu	1.232	1.229	1.231

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tahun 2021 menunjukkan di Kabupaten Rembang sudah terdapat 3 (dua) Rumah Sakit yaitu RSUD Dr. R. Soetrasno, RSI Arofah, RS Bina Bakti Husada yang berlokasi di Kecamatan Rembang. Disamping itu juga terdapat 17 Puskesmas tersebar di masing-masing kecamatan tetapi ada tiga kecamatan yang memiliki 2 Puskesmas yaitu kecamatan Rembang, kecamatan Kragan dan kecamatan Sarang. Selain Puskesmas terdapat juga 69 buah Puskesmas Pembantu dan 168 buah Pos Kesehatan Desa/PKD. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yaitu diantaranya adalah Posyandu sebanyak 1.231 buah yang tersebar di 294 desa. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi di bidang kesehatan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah saja namun partisipasi masyarakatpun sudah ada.



Dengan demikian dari sisi sarana pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat terutama untuk pelayanan kesehatan pada umumnya sudah tidak ada masalah baik dari sisi jumlah maupun keberadaannya.

Sejalan dengan meningkatnya fasilitas kesehatan, penambahan tenaga kesehatan yang meliputi dokter, perawat/bidan terus diusahakan oleh pemerintah. Pada tahun 2021 di **RSU Dr. R. Soetrasno** Kabupaten Rembang telah dilayani oleh 504 orang tenaga yang terbagi dalam tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan baik laki-laki dan perempuan. Untuk tenaga kesehatan sebanyak 504 dengan rincian sebagai berikut : dokter spesialis 32 orang, dokter umum 32 orang, Dokter Gigi 2 orang, Bidan 35 orang, Perawat 242 orang, Paramedis Non Keperawatan 55 orang serta Non Paramedis 106 orang. Sedangkan tenaga kesehatan secara keseluruhan di RSU dr. Soetrasno disajikan pada tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2. Tenaga Kesehatan di RSU Dr. R. Soetrasno Rembang, Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Rembang Tahun 2019 - 2021

No.	Tenaga Kesehatan	Jenis Kelamin 2019		Jenis Kelamin 2020		Jenis Kelamin 2021	
		L	P	L	P	L	P
1.	Dokter Spesialis	18	11	18	11	19	13
2.	Dokter Umum	14	18	14	18	16	16
3.	Dokter Gigi	0	1	0	1	0	2
4.	Bidan	0	30	0	30	0	35
5.	Perawat	87	158	87	157	85	157
6.	Paramedis Non keperawatan	27	65	25	65	8	47
7.	Non Paramedis	97	93	95	87	21	85
JUMLAH		243	376	239	369	149	355

Sumber : RSU Dr. R. Soetrasno Rembang



Hal yang menggembirakan di sini adalah untuk tenaga kesehatan yang ada di RSUD R. Soetrasno, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, sebagian besar yang ditempatkan adalah perempuan. Hal ini dapat dikatakan bahwa perempuan sangat berperan dalam bidang pelayanan kesehatan.

5.2 Angka Kematian Bayi (AKB)

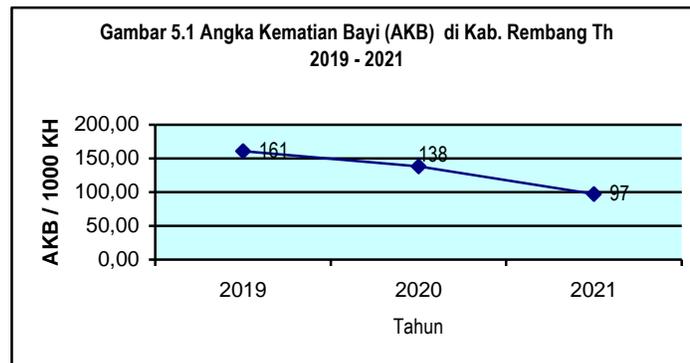
Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia 1 tahun. Angka Kematian Bayi adalah jumlah bayi berumur < 1 tahun yang meninggal dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang menyatakan jumlah Angka Kematian bayi (AKB) pada tahun 2020 sebesar 138 bayi sedangkan tahun 2021 jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) menurun menjadi 97 bayi.

Dalam rangka penurunan AKI dan AKB angka kematian ibu dan bayi. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang mempunyai Program Inovasi Telponi Temokno, Laporno dan Openi (Temukan, Laporkan dan Rawat- red) memberi dampak cukup signifikan dalam penurunan Angka kematian ibu dan bayi sampai saat ini. Kegiatan Pendampingan dilakukan dari Bidan Desa, Fasilitas Kesehatan dan Kader sejak ibu hamil sampai paska persalinan. Bidan Desa bersama Kader akan melakukan pendampingan, kunjungan rumah melakukan edukasi kepada Ibu bagaimana perawatan diri dan bayi paska persalinan, pemberian gizi pada bayi 0-6 bulan melalui asi eksklusif dan p



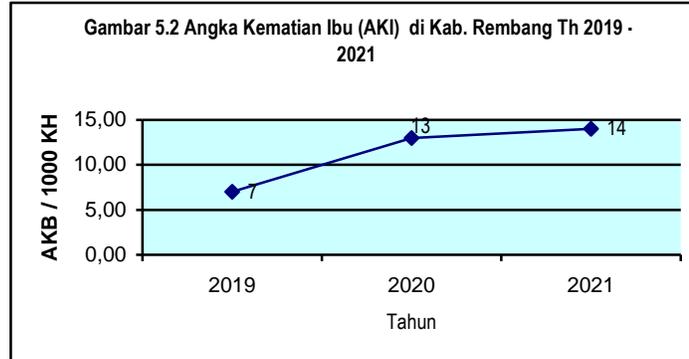
Untuk mengetahui perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Rembang dari tahun 2019 s/d tahun 2021 disajikan pada gbr 5.1



5.3 Kematian Ibu/*Reproductive Health*

Kematian maternal / ibu yang sedang hamil/melahirkan/dalam masa nifas erat kaitannya dengan kehamilan dan persalinan. Kematian ibu lebih banyak disebabkan oleh komplikasi maternal/komplikasi yang terjadi akibat pendarahan selama persalinan yang tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti penolong kelahiran pertama, kondisi tubuh ibu, dan lain sebagainya.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Rembang menyatakan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Rembang mengalami peningkatan Tahun 20120 13 kasus sedangkan tahun 2021 menjadi 14 kasus kematian ibu. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) dan jumlah kasusnya antara tahun 2019 s/d 2021 dapat dilihat pada gambar 5.2 di bawah ini ;



5.4 Partisipasi Dalam Program KB

Peran serta masyarakat dalam Keluarga Berencana (KB) disamping bertujuan sebagai pengendalian pertumbuhan penduduk, juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga.

Namun hal yang ironis bagi perempuan adalah dari pelaksanaan program yang dapat dikaitkan dengan isu gender adalah keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan KB yang sering diikuti oleh keterlibatan laki-laki pada program yang sama. Sejauh ini keterlibatan laki-laki pada program KB hanya terbatas pada jenis MOP/vasektomi dan kondom, sementara perempuan terlibat dalam banyak program/cara KB seperti, MOW, AKDR/IUD, suntik, susuk dan pil.

Pada tahun 2021 persentase Pasangan Usia Subur (PUS) pernah ber KB dan yang masih aktif mengikuti program KB sebesar 84,87 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan, sedangkan yang tidak ber KB 26,02 persen. (Tabel 5.3).

Tabel 5.3 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang pernah menggunakan alat/cara KB Kabupaten Rembang

Keterlibatan KB	Tahun		
	2019	2020	2021
1	2	3	4



Sedang ber KB	79,58	75,66	84,87
Tidak Ber KB	20,42	22,11	26,02

Sumber : DINSOSPPKB Kabupaten Rembang tahun 2019 - 2021

Yang dimaksud dengan wanita usia subur (WUS) adalah wanita usia 15 sampai dengan 49 tahun. Pada tahun 2021 di Kabupaten Rembang tercatat sebesar 121.960 WUS, dan sebesar 128.034 berstatus kawin dan disebut dengan pasangan usia subur (PUS). Kelompok umur WUS dan PUS disajikan pada tabel 5.4.

**Tabel 5.4 Banyaknya WUS dan PUS
Kabupaten Rembang Tahun 2019 - 2021**

Tahun	Jumlah	
	WUS	PUS
1	2	3
2019	131.395	133.626
2020	129.982	126.992
2021	121.960	128.034

Sumber : Data DINSOSPPKB tahun 2019 -2021

Partisipasi WUS yang berstatus kawin (PUS) dalam memakai alat kontrasepsi cenderung bervariasi dalam tiga tahun terakhir. Alat/cara KB suntikan, pil, spiral dan susuk merupakan jenis yang sudah banyak digunakan oleh WUS di Kabupaten Rembang. Pemilihan alat/cara KB ini agaknya didasarkan pertimbangan efisiensi penggunaan, biaya dan kenyamanan penggunaannya.

Pada tahun 2021 sebagian besar akseptor KB memilih cara KB suntik sebesar 76,03 persen, kemudian yang menggunakan pil sebesar 9,30 persen, pengguna susuk 8,96 , dan sebesar 5,67 persen (IUD, MOP, MOW, Kondom dan lainnya)., lebih terincinya disajikan pada tabel 5.5



**Tabel 5.5 Persentase Peserta KB Menurut Alat/Cara KB
Kabupaten Rembang Tahun 2019 – 2021**

Alat/Cara KB	Tahun		
	2019	2020	2021
1	2	3	4
M O W	3,13	3,20	1,94
M O P	0,20	0,01	0,17
AKDR / IUD	6,53	5,71	2,85
Suntik	59,37	51,84	76,03
Susuk/IMP	20,46	19,74	8,96
Pil	9,41	16,41	9,30
Kondom	0,90	3,08	0,71

Sumber : Data DINSOSPPKB tahun 2019 - 2021

5.5 Imunisasi

Imunisasi pada balita sangat penting yaitu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Apabila balita sudah tidak rentan terhadap penyakit, maka tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak akan optimal. Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang sering digalakkan ternyata mampu meningkatkan jumlah dan persentase anak balita yang diimunisasi, meskipun pada kenyataannya belum seluruh pelosok desa tercakup. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan tenaga, biaya, sarana dan prasarana yang kurang menunjang.



Imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0 – 11 bulan terdiri dari BCG 1 kali, DPT 3 kali. HB 3 kali, Polio 4 kali dan Campak 1 kali. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang tahun 2021, persentase bayi yang sudah diimunisasi BCG sebesar 95,93 persen, DPT 1/HB 1 sebesar 95,14 persen, dan Polio 4 sebesar 95,20 persen.

Tabel 5.6
Persentase Bayi usia 0 -11 Bulan yang Pernah di Imunisasi
menurut Jenis Imunisasi Kab. Rembang Th 2019 - 2021

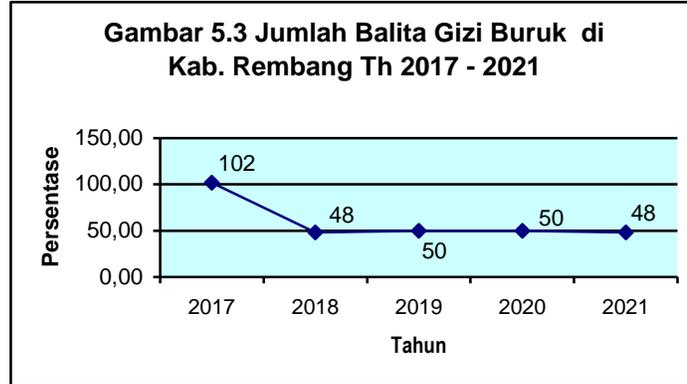
Jenis Imunisasi	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	4	5	6
BCG	104,5	92,6	95,93
DPT 1 / HB 1	107,4	95,3	93,14
Polio 4	105,6	94,2	95,20

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang 2019 - 2021

5.6 Status Gizi

Gizi yang baik tentu sangat menunjang kualitas sumber daya manusia. Gizi yang baik akan berpengaruh terhadap kesehatan dan juga kecerdasan, terutama pada balita/anak-anak pada umumnya sebagai generasi penerus. Untuk itu hendaknya kita selalu memperhatikan status gizi balita dan anak-anak untuk masa depan yang lebih baik. Pengukuran status gizi balita didapatkan dengan cara membandingkan berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Pada akhir tahun 2020 di Kabupaten Rembang ditemukan balita gizi buruk (BB/TB) sebanyak 50 balita.

Dari perkembangan gizi buruk (BB/TB) di Kabupaten Rembang pada akhir tahun 2021 tercatat jumlah balita gizi (BB/TB) sebanyak 48 balita. Sedangkan untuk melihat kasus balita gizi buruk dari tahun 2017 s/d 2021 disajikan pada gambar 5.3.





BAB VI KEGIATAN EKONOMI

Perempuan sebagai salah satu sumber daya manusia (*human resources*) bagi pembangunan mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan laki-laki. Perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk turut serta berperan dalam pembangunan dengan tanpa adanya pembedaan dengan laki-laki. Jika diperhatikan sekarang ini peranan perempuan dalam kegiatan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari perubahan sosial ekonomi (*social economic*) serta perubahan sosial budaya (*social culture*) pada masyarakat kita. Disamping itu semakin banyaknya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi tersebut juga didukung oleh semakin tingginya jenjang tingkat pendidikan perempuan. Hal tersebut memungkinkan perempuan memiliki peluang yang lebih banyak untuk memasuki wilayah pekerjaan yang selama ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki.

Dalam dunia pekerjaan persentase perempuan dalam angkatan kerja, disatu sisi menunjukkan keterlibatan langsung perempuan dalam kegiatan ekonomi, di sisi lain menunjukkan berhasil tidaknya pemberdayaan perempuan dalam membantu serta meningkatkan penghasilan keluarga. Tingginya persentase perempuan dalam angkatan kerja mengindikasikan semakin meningkatnya *double house-hold* yakni rumah tangga dimana suami maupun istri bekerja untuk penghasilan keluarga.

Namun harus kita sadari bahwa secara umum partisipasi perempuan dalam beberapa sektor kegiatan ekonomi masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Disamping itu keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi masih diwarnai dengan adanya diskriminasi.



6.1 Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.

TPAK di Kabupaten Rembang pada Tahun 2022 tercatat sebesar 70,67 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 70 orang termasuk angkatan kerja. Atau dapat diartikan dari 1.000 orang penduduk usia kerja sekitar 706 orang diantaranya aktif secara ekonomi. Dibandingkan Agustus 2020 (65,17 persen), TPAK Tahun 2021 mengalami peningkatan.

**Tabel 6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020 - 2021**

Jenis Kelamin	Periode	
	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3
Laki-laki	79,46	84,10
Perempuan	51,17	57,49
TOTAL	65,17	70,67

Sumber : BPS Kabupaten Rembang



Apabila dikaitkan dengan isu Gender pada Tabel 6.1 menunjukkan bahwa TPAK laki-laki jauh lebih besar daripada TPAK perempuan. Dari analisis angkatan kerja menurut jenis kelamin terjadi penurunan TPAK laki-laki dari 79,47 persen pada Tahun 2020 menjadi 84,10 persen pada Tahun 2021. Sebaliknya TPAK perempuan mengalami sedikit peningkatan dari 51,17 persen menjadi 57,67 persen.

6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai mereka yang tidak bekerja dan saat ini sedang aktif mencari pekerjaan, termasuk mereka yang pernah bekerja atau sedang dibebastugaskan sehingga menganggur dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Angka pengangguran dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persentase, yang selanjutnya disebut tingkat pengangguran terbuka (TPT). Ukuran ini dapat digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di Kabupaten Rembang.

Tabel 6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Rembang Tahun 2019 - Tahun 2021

TPT	Periode		
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4
Laki-laki	3,87	6,40	4,09
Perempuan	3,13	2,45	3,07
TOTAL	3,60	4,83	3,67

Sumber : BPS Jawa Tengah



Bila dilihat menurut jenis kelamin, TPT perempuan pada Tahun 2021 lebih kecil dari pada TPT laki-laki, yaitu 3,07 persen berbanding 4,09 persen. TPT perempuan pada Tahun 2021 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2020, untuk TPT laki – laki juga mengalami sedikit penurunan dari 6,40 persen pada Tahun 2020 mengalami penurunan 4,09 persen pada Tahun 2021.

6.3. Jumlah Pengangguran

Tingkat pengangguran diukur dengan presentase jumlah orang yang belum bekerja. Data pengangguran sangat penting karena menunjukkan tingkat kemiskinan suatu negara dan dapat memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi suatu wilayah. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan keresahan sosial dan mengurangi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Rembang sering mengambil tindakan untuk menurunkan tingkat pengangguran dengan berbagai cara seperti memberikan pelatihan kepada para pengangguran/ pencari kerja agar memiliki keterampilan.

Tabel 6.3 Presentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2019 – Tahun 2020

Presentase Pengangguran	Periode		
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4
Pendidikan Dasar Kebawah	0,86	1,64	1,58
Pendidikan Menengah	14,36	8,36	4,40
Pendidikan Tinggi	2,38	2,61	7,90

Sumber : BPS Jawa Tengah



BAB VII PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana posisi, peran dan keterlibatan perempuan di Kabupaten Rembang dalam pengelolaan sektor publik. Apakah para perempuan telah memiliki ruang dan kesempatan yang cukup dalam memperjuangkan hak-hak dan mampu mengoptimalkan potensi dirinya dalam suatu ranah kepublikan. Apakah para perempuan Rembang, di mana tempat Kartini sebagai tokoh emansipasi tumbuh, berkembang, dewasa, berkeluarga dan mengabdikan dirinya hingga akhir hayatnya disemayamkan telah berhasil keluar dari kungkungan feodalisme – patriarkis. Apakah para emansipatoris di sini telah mampu membuktikan diri bahwa ia adalah aktor strategis dan subyek penentu dalam kebijakan publik lokal dan kehadirannya tidak hanya sebatas obyek, *konco wingking* dan pelengkap penderita belaka. Sejauh mana perempuan Rembang memiliki pandangan-pandangan, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, semangat dan kemampuan untuk menemukan 'peta jalan' dalam membangun kesetaraan gender yang mapan, memiliki dukungan dan kepercayaan publik (*social trust*) secara luas dan berkesinambungan. Apakah para perempuan di sini telah merasa terpanggil dalam memperjuangkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik ke-perempuan-an dalam proses politik, kebijakan, pembangunan, pemberdayaan dan perlawanan terhadap sesamanya. Sejauh mana hubungan antara perempuan, demokrasi, desentralisasi dan *good governance* terbangun secara kuat dan mapan dalam tatanan *local's women soft politic* di kota ini?. Bagaimana komitmen mereka, apa saja yang telah berhasil diraih, apa yang belum dan gagal, bagaimana meraihnya, apa resep-resepnya dan dimana letak kelemahan dan kegagalannya serta bagaimana solusi untuk mereka agar sukses dalam memperjuangkan hak-haknya dalam politik dan kepublikan, baik di Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif serta peran-peran kepublikan lain yang lebih luas baik pada level kecamatan, desa hingga



di lingkungannya sendiri (RT/RW). Apakah para perempuan telah mampu mencapai kemerdekaan publik, baik pada ranah publik politik, negara, sosial, ekonomi, budaya dan publik lainnya.

Dalam kenyataan sehari-hari pada sektor publik, baik publik negara, pasar maupun masyarakat, yang termanifestasi dalam politik, pembangunan maupun pemberdayaan, istilah dan makna publik, selalu identik dengan dunia kelaki-lakian (maskulinitas). Dominasi dan hegemoni maskulinitas tumbuh subur dalam tradisi patriarki telah merebak dan mendarah daging melampaui batas nilai-nilai universal baik hak asasi manusia, demokrasi, desentralisasi, *good governance* dan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat mulai dari cara pandang, nilai-nilai, norma, perilaku kebijakan (sistem operasional–mekanisme/prosedur) hingga struktur kelembagaan/wadah (kultur, struktur dan proses) yang ada selalu lekat dengan budaya kebabakan (*bapakisme*). Sehingga tidaklah berlebihan jika ruang, kesempatan dan produk kebijakan publik menjauh dari sensitivitas gender alias mengabaikan eksistensi, harga diri dan hak-hak asasi perempuan.

Wajah sektor publik kita menjadi 'bias laki-laki' dan semakin mendalamkan perilaku yang tidak permisif bahkan seolah semakin 'memojokan' terhadap kehadiran perempuan dalam peran-peran publik. "Dunia negara", "dunia umum" dan "dunia luar rumah" sebagai dunia bukan perempuan, sebaliknya perempuan identik dengan "dunia dapur, sumur dan kasur". Ruang tamu misalnya, juga bukan ruang perempuan, karena perempuan tidak boleh atau tidak etis menemui tamu, sebaliknya ia harus melayani, membawakan makanan dan minuman. Jika sang suami meninggal atau berpisah karena suatu hal, maka kepala rumah tangga adalah anak laki-laki tertua, bukan ibu. Patriarki tidaklah mengenal ibu sebagai *single parent*. Sebaliknya ibu adalah *konco wingking*, kehadirannya selalu mengkodrat sebagai "*wani ditata*" (wanita) dan perempuan sebagai *babon* atau *wadon*, *wedok* yang berarti sarana reproduksi, ia berkewajiban memberikan



keturunan biologis bagi keluarga, bukan pemimpin. Inilah wajah perempuan kita, di mana dalam rumah dan keluarga pun banyak didominasi oleh ruang laki-laki, apalagi dalam dunia publik negara atau yang lebih luas lagi. Perempuan seolah dilahirkan tidak sebagai warga masyarakat apalagi warga negara, sebaliknya hanya sebatas warga domestik. Apakah realitas sosial, publik dan politik di Rembang menandakan gejala demikian?. Apakah wajah dan kiprah perempuan di Kota Kartini telah mampu sebagai garda depan, *agent of change* sekaligus aktor utama (*leadher*) dalam kampanye *global soft politics*, yang tidak lain adalah perjuangan terhadap hak asasi manusia, gender, demokrasi, desentralisasi, *good governance* dan lingkungan hidup. Laporan bab ini akan mencoba melukiskan bagaimana potret perempuan dalam perjuangan penguatan peran di sektor publik di Kabupaten Rembang.

7.1 Partisipasi Perempuan dalam Bidang Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

Pada tataran praktis kehadiran perempuan dalam sektor publik negara, khususnya legislatif, eksekutif dan yudikatif tidaklah seindah harapan mereka tentang makna representasi keperempuanan. Memang sensitivitas gender bukanlah semata-mata merujuk pada jenis kelamin juga tidak menunjuk pada besaran angka (jumlah--kuantitas). Sensitivitas gender lebih mengacu kepada kesadaran, penghargaan, kepekaan dan komitmen keberpihakan kepadanya. Meski demikian untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Pembangunan kesadaran dan komitmen keberpihakan ternyata jauh lebih rumit dan memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Tantangan ini terkadang kontra produktif bahkan anti terhadap gender. Kendala (*constrains*) itu meliputi baik kultural, struktural maupun proses dalam pengambilan keputusan-keputusan publik yang tidak memiliki *sense* terhadap perempuan.

Masih banyaknya para pimpinan pejabat publik politik, penegak hukum dan para biokrat pelayan masyarakat lainnya yang masih memandang sebelah mata



terhadap kapasitas dan kapabilitas perempuan dalam penyelesaian-penyelesaian masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan. Padahal jika dilihat dari sisi SDM, pengalaman dan peran nyatanya di masyarakat, sudah banyak perempuan yang tidak kalah dari laki-laki. Demikian juga dalam kiprah politik dan sosial kemasyarakatannya. Perempuan dalam banyak kasus selalu disudutkan dan disekap dengan dimensi kultural dan biologis yang membelitnya. Seperti ungkapan sinis yang ditujukan bagi perempuan yang dianggap terlalu aktif dan dianggap "*nglangkahi*" laki-laki, karena dianggap disfungsional domestik, seperti terlukis dalam ungkapan; "*untuk apa jadi perempuan yang tidak pomah, wong wedok kok awak dienggo sikil, sikil dienggo awak, wong wedok iku tenguk-tenguk ning omah wae cukup*". Ungkapan lain yang bernada apologis seperti "*wong wedok ngene wae cukup, ora susah repot-repot. Wong wedok iso ngliwet karo dandan wis cukup, ora usah neko-neko....*". Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lainnya.

7.2 Perempuan dan Legislatif

Di hampir seluruh daerah di Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Rembang, kehadiran perempuan secara kuantitatif selalu lebih banyak daripada laki-laki, demikian juga secara politik (hak suara). Data dari berbagai sumber (BPS, KPUD, Kesbang & Linmas) menunjukkan bahwa pada pelaksanaan Pilkada Rembang tahun 2021, terlihat dari jumlah total pemilih 488.042 jiwa, pemilih perempuan sebesar 245.241 sedangkan pemilih laki-laki 242.801 jiwa. Ini berarti bahwa realitas politik perempuan memegang posisi kunci dan menentukan dalam proses-proses politik suara. Sedangkan dari sisi kualitatif, komitmen perempuan dalam politik jauh lebih kuat di banding laki-laki. Perempuan dianggap lebih kuat untuk memegang teguh prinsip dalam memilih



dari pada laki-laki yang sangat rentan terhadap godaan *money politik* dan kampanye negatif lainnya.

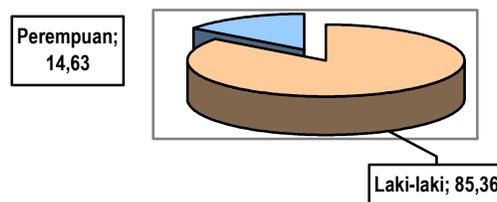
Namun demikian jumlah perempuan yang lebih besar secara real politik (*vote*) ternyata tidak sebanding dengan jumlah mereka yang berhasil sebagai anggota DPRD (legislator). Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.1. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang Tahun 2021

No.	Komisi	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1.	A	-	9	9
2.	B	-	11	11
3.	C	1	9	10
4.	D	5	6	11
Jumlah		6	35	41

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2021

Gambar 7.1. Presentase Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang Tahun 2021



Dari data tabel di atas jumlah perempuan dalam politik praktis di kabupaten Rembang mengalami penurunan dari 10 keterwakilan perempuan (22,22%) menjadi 6 keterwakilan perempuan (14,63 %) yang berarti kurang dari syarat ideal, di mana sesuai UU No. 12 Tahun 2003 yang mengatur kuota 30 % untuk perempuan. Dengan demikian ruang politik perempuan di Legislatif cukup *representable*



terhadap gender sensitivities. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sistem kebijakan publik yang bisa melindungi, memperjuangkan dan mengoperasikan hak-hak mereka untuk turut menentukan dan mewarnai setiap produk kebijakan jelas jauh dari harapan. Seperti bagaimana para perempuan bisa mengawal kepentingan mereka proses politik di DPRD mulai dari sidang komisi, panggar (panita anggaran) hingga paripurna misalnya. Apakah mereka telah memiliki akses politik kebijakan yang memadai mulai dari *input--procces--output* perumusan kebijakan publik jika mereka tidak bisa hadir di sana. Khususnya dalam pembuatan Perda dan berbagai kesepakatan-kesepakatan, persetujuan-persetujuan, nota kesepahaman, pandangan-pandangan umum, hingga pada kontrak-kontrak politik yang lainnya. Dampaknya jelas banyak produk hukum dan beberapa kebijakan di kota ini yang tidak ramah dan *welcome* terhadap keterlibatan perempuan.

Namun dengan jumlah yang sangat kecil dan kapasitas SDM yang pas-pasan ditambah penguasaan issue-issue pengarusutamaan gender yang kurang akan menyulitkan perjuangan mereka dalam perebutan ruang publik kebijakan untuk perempuan.

7.3 Perempuan dan Eksekutif

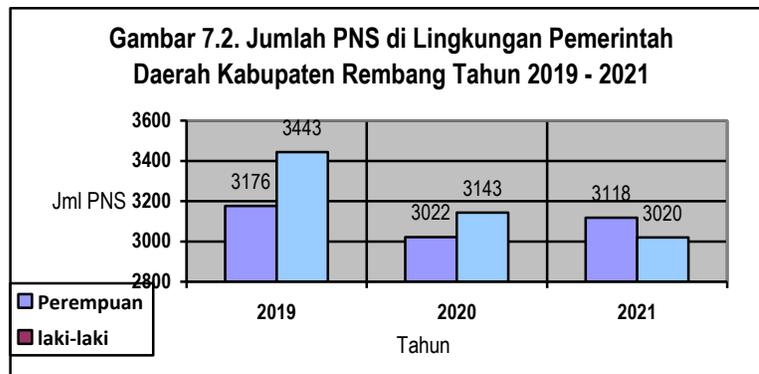
Eksistensi perempuan dalam birokrasi Pemda (eksekutif) menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Meski jumlah pegawai perempuan hampir sama dengan jumlah laki-lakinya, namun nasib birokrat perempuan tidak seberuntung dengan laki-laki. Perempuan masih menduduki posisi *pupuk bawang*, jumlah jabatan terbanyak pada eselon terendah (V) yang tersebar pada kantor kelurahan sebagaimana tergambar dalam beberapa tabel di bawah.



Tabel 7.2. Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2019 - 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai 2019	Jumlah Pegawai 2020	Jumlah Pegawai 2021
1	Perempuan	3.176	3.022	3.118
2	Laki-laki	3.443	3.143	3.020
Jumlah		6.619	6.165	6.138

Sumber: BKD Tahun 2021



Tabel 7.3. Presentase Jumlah PNS Berdasarkan Eselon I, II, III, IV dan V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2020 - 2021

No	Eselon	Tahun 2020				Tahun 2021			
		Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	I	0	0	0	0	0	0	0	0
2	II	3	0,56	18	3,42	2	0,37	15	2,82
3	III	25	4,74	101	19,16	24	4,51	93	17,51
4	IV	145	27,51	235	44,59	163	30,69	234	44,06
5	V	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		173	32,81	354	67,17	189	35,57	342	64,39



Sedangkan apabila kita lihat dari Jabatan fungsionalnya maka jumlah kaum perempuan lebih banyak di bidang pendidikan dan kesehatan, hal ini tentunya disebabkan karena kaum perempuan memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dari pada laki-laki.

Tabel 7.4. Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Jenis Jabatan Fungsional	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
		Jml	Jml	Jml	Jml
1	Guru	1.422	1.084	1.404	1.029
2	Penyuluh Pertanian	22	26	22	23
4	Penyuluh KB	20	18	19	16
5	Auditor	6	1	8	3
6	Instruktur	2	10	5	12
7	Penguji Kendaraan Bermotor	0	0	0	3
8	Kesehatan	723	205	756	220



Tabel 7.5. Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan Pemerintahan dari Tingkat Kecamatan, Kelurahan maupun Pedesaan Tahun 2020 – 2021

No	Jabatan Pemerintahan	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1	2	3	4	5	6
1	Camat	0	14	1	13
2	Kepala Kelurahan	0	7	0	7
3	Kepala Desa	25	262	24	263
4	Sekdes	60	227		
5	Anggota BPD	522	1431	534	1.419
Jumlah		607	1.941	559	1.702

Sumber : Bagian Tapem Setda Rembang Tahun 2021

Ada banyak hal yang bisa menjelaskan setidaknya berawal dari diri pegawai negeri perempuan itu sendiri. Tentu kita sepakat bahwa sejauh apapun para perempuan memiliki karier akan lebih baik jika tetap memegang teguh agama dan kebudayaannya yang berarti sadar akan kodratnya sebagai wanita dan pemegang amanah sarana reproduksi/regenerasi atau pemberi keturunan.

Tetapi dalam tradisi birokrasi pemerintah daerah, naluri alamiah kewanitaan ini terkadang terlalu dieksploitasi dalam rancang bangun kebijakan kepegawaian khususnya dalam pengembangan karier mereka. Baperjakat dalam banyak kasus telah bergerak untuk mendalami upaya degenderisasi, di mana upaya promosi perempuan terkadang selalu dikaitkan dengan lingkungan horisontal maupun vertikalnya yang laki-laki. Perempuan *by design* diposisikan dalam “perempuan di sarang penyamun” yang tidak jauh dengan “burung dalam sangkar”. Kehadirannya tidak jarang perempuan dipandang sebagai sosok ikutan, atau *nunut mulyo* kepada yang laki-laki, baik di kantor maupun di rumah tangga. Tidak banyak diberikan pekerjaan yang menurut



pandangan mereka pada pimpinan dan baperjakat “terlalu merepotkan/memberatkan perempuan” atau tidak cocok dengan perempuan. Dalam diri birokrasi ternyata ada pemilahan secara *latent* sebagai pekerjaan perempuan dan pekerjaan laki-laki. Pandangan ini jelas melecehkan kaum perempuan di mana seolah-olah mereka bukan sosok pribadi yang mandiri, tegas dan memiliki integritas yang otonom dalam mengambil keputusan baik *public policy* maupun untuk diri dan masa depan mereka sendiri. Dari berbagai pengalaman yang ada perempuan selalu dikaitkan dengan suami, di mana para perempuan di lembaga ini bisa jadi tidak berkembang kariernya gara-gara posisi suami yang lebih rendah dari dirinya misalnya, baik secara pendidikan, posisi hingga pendapatan keluarga. Lebih repot lagi apabila cara pandang dalam kebijakan penataan kepegawaian dan pengembangan karier mereka sangat lekat dengan politik. Sementara perbedaan pendapat belum mendapatkan tempat yang layak dalam diri pemimpin-pemimpin di daerah, maka para perempuan bisa menjadi “korban” kebijakan yang terbanyak untuk kasus ini.

Bukan hanya problem kultural saja, secara struktural dan prosedural para perempuan juga mendapatkan halangan yang luar biasa ketika akan menduduki jabatan yang lebih tinggi. Mereka akan sulit untuk bisa berada pada posisi lebih tinggi dalam lingkungan kerjanya, apalagi jika terdapat teman sebaya/seangkatan atau sedikit lebih tinggi atau rendah darinya sementara mereka laki-laki. Perempuan ini akan mengalami kesulitan untuk bisa memimpin atau melangkahi satu tingkat di atasnya meskipun secara SDM dan kepemimpinannya mumpuni.

7.4 Perempuan dan Yudikatif

Sementara jajaran yudikatif memiliki sensitivitas gender yang sangat menyolok, untuk kejaksaan memiliki 10 Jaksa laki-laki dan 3 jaksa perempuannya. Dan dari institusi yudikatif, Kepolisian termasuk yang tertinggal



dalam pengarusutamaan gender, yakni dari 677 orang, polisi perempuan (polwan) hanya 32 orang, sedangkan laki-lakinya mencapai 645 orang. Sedangkan lembaga pengadilan / kehakiman pengarusutamaan gender sudah seimbang yaitu dari hakim yang ada, 4 orang hakim perempuan .

Perempuan terlepas dari klaim yang dibangun dalam pengembangan SDM di Indonesia yang patriarkis, kelemahan yang lemah lembut itu justru sekaligus keunggulan dalam membangun jati diri khususnya di dunia pengadilan. Wanita dianggap lebih teliti, hati-hati dan cermat dalam proses pengambilan keputusan, oleh karena itu pada bidang ini mereka mendapatkan tempat yang cukup layak. Bisa jadi ini kasus lokal dan secara kebetulan, tetapi keterlibatan perempuan dalam lembaga kepengacaraan ternyata sama banyaknya dengan laki-laki. Hal ini berbeda dengan kejaksaan yang dianggap masih dibutuhkan dimensi kekerasan dan ketegasan dalam pekerjaannya. Apalagi institusi kepolisian yang masih kuat dengan klaim tradisi kekerasannya. Tentu ini adalah tantangan besar dalam mengembangkan kelembagaan sekaligus penataan SDM dalam arti yang lebih luas. Terlebih di era *soft politics* saat ini menjadi tertinggal dan tidak menarik bagi siapapun jika tidak segera melakukan koreksi dan langkah-langkah nyata dalam merespon dan mengembangkan sensitivitas gender. Karena sejauh apapun peran lembaga-lembaga negara adalah sebagai pelayan publik termasuk dalam pelayanan penegakan hukum dan pengayoman masyarakat. Karena penegakan dan pengayoman adalah bentuk pelayanan publik negara, maka sudah seharusnya watak yang dikembangkan adalah watak pelayan yang harus sopan, lembut dan berbudaya.



Tabel 7.6. Jumlah Hakim, Jaksa dan Polisi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang Tahun 2020 - 2021

No	Jabatan	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1	2	3	4	5	6
1	Hakim	4	2	4	2
2	Jaksa	3	11	3	10
3	Polisi	32	643	32	645
Jumlah		39	656	39	657

Sumber : Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Polres Tahun 2020 - 2021

7.5 Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik

Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi, karena dengan kesetaraan gender seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri. Dan partai politik menjadi wadah tak terhindarkan jika perempuan ingin memperkuat dirinya dalam membangun kebijakan kesetaraan gender. Mengingat partai politik adalah rahim legislator.

Namun dalam praktik partai politik tidak beda jauh dengan lembaga negara lain, yang tetap saja melihat sebelah mata terhadap eksistensi perempuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, *pertama* banyak wajah partai yang merasa masih efektif menggunakan metode mobilisasi sebagai strategi terbaik. Strategi ini bukan hanya mengandalkan peran lapangan dan praktik dari pada peran-dometik dan konseptual. Dengan strategi demikian partai politik masih menganggap relevan dikembangkan budaya keras seperti intimidasi dan pemaksaan baik melalui media pekerjaan, *money politic*, keluarga, maupun per2awanan. Sehingga tidak mengherankan jika kehadiran perempuan dalam pengurus harian partai sangat rendah. Terlebih lagi UU politik no 32 th 2004 sebagai pengganti UU no 12 th 2003 tidak mengatur secara eksplisit tentang



persentasi kehadiran sebagai syarat wajib dalam penentuan anggota lesgislatif dari masing-masing partai. Akibatnya banyak partai yang menganggap tidak penting keterlibatan perempuan dalam politik praktis. Padahal jika kita melihat arah ke depan, demokrasi, desentralisasi, lingkungan, dan *good governance* jelas tidak akan surut sebaliknya terus akan menguat. Maka akan menjadi sulit jika para pemilik partai tidak segera menjemput perubahan politik. Mereka harus segera mengubah pendekatan dari tradisi *hard politics* ke arah *soft politics*.

Perempuan agar bisa eksis dan kuat pada sektor publik sudah seharusnya mereka mendapatkan pendidikan, pekerjaan, hak milik dan hak pilih yang sama dan adil dengan laki-laki. Perempuan juga harus sudah mulai secara sadar dan bertanggung jawab tidak membelenggu diri mereka untuk urusan-urusan domestik saja, ibu rumah tangga & berbagai pembatasan-pembatasan atas kehormatan mereka. Para perempuan sudah seharusnya memperjuangkan Hak asasi kemanusiaannya dan bersaing secara seimbang dengan pria dalam bidang politik dan pekerjaan. Para perempuan di Rembang harus mulai berani untuk “menantang patriarkhi”, dan memperjuangkan secara gigih, tekun, teratur dan konsisten terhadap kesetaraan gender, termasuk dalam kekuasaan publik negara, swasta dan pasar.



Tabel 7.7. Jumlah Pengurus Harian Partai Politik di Kabupaten Rembang Tahun 2021

No	Nama Parpol	Perem Puan	%	Laki-laki	%	Jum Lah
1.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	3	100	3
2.	Partai Keadilan Sejahtera	0	0	3	100	3
3.	Partai Amanat Nasional	0	0	3	100	3
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	33	2	67	3
5.	Partai Keadilan dan Persatuan Bangsa	0	0	3	100	3
6.	Partai Golongan Karya	0	0	3	100	3
7.	Partai Perindo	1	33	2	67	3
8.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	0	3	100	3
9.	Partai Nasdem	1	33	2	67	3
10.	Partai Hanura	0	0	3	100	3
11.	Partai Gerindra	0	0	3	100	3
12.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1	33	2	67	3
13.	Partai Demokrat	0	0	3	100	3
14.	Partai Berkarya	0	0	3	100	3
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1	33	2	67	3
16.	Partai Bulan Bintang	1	33	3	67	3
	JUMLAH	6		42		

Sumber : KPUD Tahun 2019

Oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan para perempuan di Rembang antara lain: *Pertama*, pendidikan kader politik untuk menempati pranata-pranata demokrasi mulai dari tingkat paling bawah, seperti *Dewan Kelurahan, Dewan Kota, Badan Perwakilan Desa* sampai ke *DPRD Kabupaten atau Kota*. *Kedua*, membangun dukungan politik untuk memfasilitasi perempuan yang mempunyai kapabilitas dalam kepemimpinan politik. *Ketiga*, membentuk *forum perempuan lintas partai* politik yang tidak terbatas pada parpol peserta pemilu, akan tetapi berasal dari parpol-parpol yang bukan peserta pemilu.



Keempat, mendesakkan gagasan keadilan dan kesetaraan gender untuk seluas mungkin diatur dalam AD/ART partai politik, juga program politik parpol. *Kelima*, menyusun kerangka kerja peningkatan kualitas peran politik perempuan di lembaga perwakilan serta mengimplementasikannya dengan dukungan sumber daya yang memadai. *Keenam*, mendesakkan calon perempuan menjadi kepala daerah dan memastikan bahwa sebagian besar perempuan akan mendukungnya sehingga kemungkinan perempuan duduk sebagai kepala daerah lebih terbuka.

Seperti halnya kaum pria, perempuan pun perlu aktualisasi diri sebagai wanita (kodrati), anggota masyarakat, dan warga negara. Memang Feminisme masih perlu perjuangan panjang menuju kesetaraan dan keadilan gender, namun, ia tidak boleh lepas dari kaedah agama dan budaya sehingga keberadaan kodrati perempuan tidak terkikis.

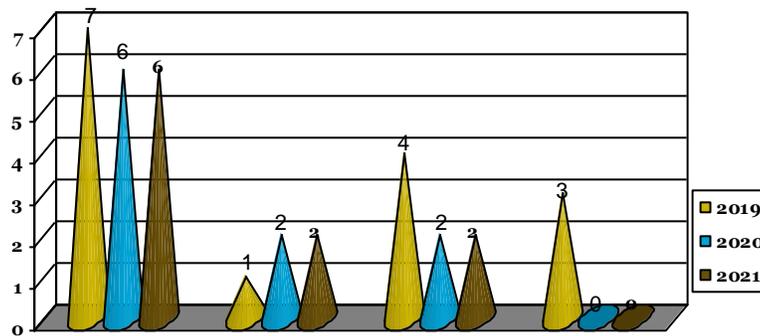


BAB VIII KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kekerasan/*Violence* yang terjadi pada perempuan sudah sejak lama terjadi hal tersebut dapat dimaklumi, dimana budaya patriarki telah melekat kuat bagi perempuan yang berakibat status dan posisi perempuan berbeda dengan laki-laki di dalam rumah tangga, tempat kerja, adat istiadat dan masyarakat luas, maupun di semua bidang kehidupan perempuan.

Data yang tercatat dari Unit Pelayanan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Semai RWC3 di Tahun 2021 bahwa telah terjadi 9 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yaitu 6 kasus kekerasan fisik KDRT, 2 kasus kekerasan seksual, dan 2 kasus kekerasan psikis. Sedangkan untuk kasus Kekerasan terhadap Anak ada 13 kasus yang terbagi menjadi 13 kasus kekerasan seksual dan 3 kasus kekerasan fisik tentunya data atau angka tersebut belum menggambarkan fakta yang sebenarnya karena banyak korban kekerasan yang tidak mau mengungkapkan kekerasan yang dialami.

Gambar 8.1. Jumlah dan Jenis Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Rembang Tahun 2019 - 2021





Banyaknya korban kekerasan yang tidak melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum disebabkan oleh banyak hal seperti adanya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan domestik, sehingga orang lain tidak berhak mencampurinya. Demikian pula dengan korban kekerasan lainnya, seperti perkosaan yang takut melaporkan karena malu diketahui orang lain bahwa dirinya sudah tidak “ Suci / Perawan “ lagi, sehingga sering kali kekerasan terhadap Perempuan disebut sebagai kriminalitas tersembunyi (*The Hidden Crime*). Meningkatnya kasus kekerasan yang terjadi baik di lingkup publik maupun privat dapat diibaratkan sebagai Fenomena Gunung Es karena yang diketahui publik sangat sedikit, sementara kondisi yang sebenarnya tersembunyi dibawah permukaan.

Peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga. Sebagai akibat dari adanya krisis Ekonomi yang berkepanjangan muncul keluarga-keluarga miskin baru yang berpotensi sangat besar pada krisis moral, rendahnya kesempatan memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, cenderung melakukan perbuatan yang diluar kontrol.

Pornoaksi dan pornografi yang semakin mudah diakses/didapat akibat kemajuan teknologi yang begitu pesat, dan hal ini tidak bisa dihindari berimbas pada tindakan pelecehan seksual sebagai pelampiasan hasrat seksual yang tidak/belum bisa tersalurkan.

Banyaknya anak jalanan dan anak terlantar yang ada di Kabupaten Rembang memberikan gambaran sebagai salah satu akibat dari kekerasan terhadap perempuan.

Kodrat seorang perempuan yang mengandung, melahirkan dan menyusui membuat kedekatan emosional maupun kedekatan batin dengan



anaknyanya, sehingga seorang ibu/perempuan akan berpengaruh dan menentukan generasi masa depan.

Apabila terjadi ketidak setaraan serta perlakuan yang buruk terhadap perempuan maka akan berakibat terhadap anak dan keluarganya, karena bagaimana seorang ibu dapat memperlakukan anaknya dan keluarganya dengan baik apabila perlakuan terhadap dirinya tidak bisa dikatakan baik.

Peraturan dan Undang-Undang sudah ada untuk menjerat pelaku kekerasan, yang juga sudah di sosialisasikan sampai di Tingkat Desa. Unit Pelayanan dan Unit Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak juga sudah dibentuk sampai di Tingkat Desa namun karena budaya malu dan hal itu merupakan hal yang tabu maka Unit Pengaduan yang sudah dibentuk sejak tahun 2009 itu kurang berfungsi secara optimal.



BAB IX INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Rembang pada dasarnya adalah penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang akan dicapai selama lima tahun, yang penjabarannya dituangkan dalam RPJM daerah Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021. Oleh karena itu perlu ditetapkan target agregat berdasarkan beberapa indikator utama pembangunan dan dirumuskan sebagai tonggak penjur (milesstone) atau sasaran antara yang ingin dicapai pada akhir perencanaan. Target agregat pembangunan Kabupaten Rembang digambarkan dalam beberapa indikator utama, meliputi capaian IPM (indeks Pembangunan Manusia), Indeks Pembangunan Gender (IPG) , Indeks Pemberdayaan Gender (IGD), pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi.

Besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada range nilai terendah 40 dan tertinggi 80 yang diperhitungkan berdasarkan empat sub indikator yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf , rata-rata lama sekolah pendidikan dan tingkat daya beli masyarakat. Tetapi mulai tahun 2015 penghitungan IPM terjadi perubahan metodologi , hal ini disebabkan beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan seperti angka melek huruf sudah tidak relevan lagi untuk menggambarkan kualitas pendidikan dan PDB perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat suatu wilayah.

Pada tahun 2021 untuk menghitung IPM diperlukan indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH) , harapan lama sekolah (HLS) , rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Besarnya IPM Kabupaten Rembang tahun 2021 termasuk kategori sedang yaitu sebesar 70,43. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2019 yang hanya mencapai 70,15 mengalami sedikit penurunan menjadi 70,02 pada tahun 2020 dan meningkat pada Tahun 2022 menjadi 70,43.



Capaian indikator agregat dan komponen-komponen pembentuknya dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 9.1 Capaian Agregat Kabupaten Rembang Th. 2019 - 2021

No	Indikator	2019		2020		2021	
		Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	76,22	72,53	76,34	72,67	76,43	72,73
2	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,92	12,13	12,08	12,14	12,11	12,15
3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,61	7,71	6,68	7,72	6,82	7,86
4	Pengeluaran perkapita (ribu Rp)	7.351	15.762	7.135	15.357	7.326	15.543
Indeks Pembangunan Manusi (IPM)		65,17	75,04	65,16	74,90	65,70	75,24

Sumber data : BPS Kabupaten Rembang

Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, IPM kabupaten Rembang pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Blora, tetapi lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pati . Namun demikian besarnya nilai IPM tersebut masih berada dibawah IPM rata-rata Kabupaten (Jawa Tengah) yang mencapai 72,16 Sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 9.2 Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Lain Th. 2017 - 2021

No	Kabupaten dan Propinsi	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Rembang	68,95	69,46	70,15	70,02	70,43
2	Pati	70,12	70,71	71,35	71,77	72,28
3	Blora	67,52	67,95	68,65	68,84	69,73
4	Jawa Tengah	70,52	71,15	71,73	71,87	72,16

Sumber data : BPS Provinsi Jawa Tengah



Sementara itu tolok ukur keberhasilan peningkatan kesetaraan gender dihitung berdasarkan IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Besarnya nilai IPG paling rendah 40 dan tertinggi 80, dengan sub indikator sama dengan IPM, namun indikator tersebut terpilah antara laki-laki dan perempuan yang meliputi prosentase penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah angkatan kerja perempuan, jumlah perempuan yang bekerja di tingkat manajer dan terampil serta keterwakilan perempuan dalam politik.

Besar IPG Kabupaten Rembang pada tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2020 yaitu dari 87,00 menjadi 87,32 Sedangkan untuk besar IDG Kabupaten Rembang pada tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami penurunan. Besarnya nilai IPG dan IDG Kabupaten Rembang selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 9.3 Capaian IPG dan IDG Kabupaten Rembang Th. 2018 - 2021

No	Indeks	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,49	86,85	87,00	87,32
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,12	65,79	65,78	65,88

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah



Tabel 9.4 Perbandingan Nilai IPG dan IDG Kabupaten Rembang Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2019 - 2021

No	Indeks	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
	Rembang	86,85	87,00	87,32
	Pati	91,60	91,50	92,21
	Blora	83,96	83,88	84,59
	Jawa Tengah	91,89	92,18	92,48
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
	Rembang	65,79	65,78	65,88
	Pati	66,99	66,69	66,65
	Blora	65,59	64,37	64,36
	Jawa Tengah	72,18	71,73	71,64

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2021 besarnya IPG Kabupaten Rembang mengalami peningkatan sedangkan IDG Kabupaten Rembang mengalami sedikit peningkatan sejalan dengan meningkatnya pendidikan kaum perempuan dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini didukung oleh kebijakan dari pemerintah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan sebagaimana Inpres No, 9 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang Berkeadilan yang didalamnya mengamanatkan adanya anggaran yang responsif gender untuk mencapai tujuan pembangunan milenium pada tahun 2022.



BAB X PENUTUP

Tersedianya data berbasis gender di berbagai bidang kehidupan menjadi sangat penting serta lebih bermakna apabila suatu alternatif kebijakan baru akan diambil dalam rangka menuju proses perbaikan sosial yang mengarah pada wawasan gender di suatu wilayah. Perbaikan sosial yang dimaksud adalah tersedianya suatu formulasi kebijakan yang akan memungkinkan mengurangi bias gender dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Berkaitan dengan tersusunya Buku Statistik Gender dan Analisis di Kabupaten Rembang tahun 2022 maka diharapkan analisis tersebut menggugah para pengambil keputusan di daerah ini untuk lebih menerapkan kebijakan yang berwawasan gender, dengan menyetarakan kedudukan perempuan dengan laki-laki di berbagai bidang kehidupan. Jika hal ini akan dilembagakan, sehingga akan terjadi secara berkesinambungan maka pemutakhiran data berbasis gender sangat penting untuk dilakukan.

10.1 Kesimpulan

1. Jumlah penduduk Kabupaten Rembang memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 1,12 % mengalami kenaikan 0,47 % pada tahun 2021.
2. Komposisi penduduk perempuan empat tahun terakhir menyebutkan jumlahnya lebih besar dari penduduk laki-laki dan ada kecenderungan semakin lebih besar penduduk perempuannya, yang ditunjukkan angka seks ratio yang semakin turun dari tahun ke tahun sedangkan tahun 2021 jumlah penduduk perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki, dapat dilihat dari angka sex ratio yang menurun.



3. Masih didapatkannya usia perkawinan muda (-19 tahun) untuk perempuan pada tahun 2021 di Kabupaten Rembang sebesar 1504 orang dan usia (-19 tahun) laki-laki sebanyak 25 orang.
4. Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan sebanyak 18,45 persen, sebagian besar mereka berstatus cerai mati dan cerai hidup.
5. Angka partisipasi anak usia SD meningkat sedangkan angka partisipasi SMP dan SLTA tahun 2020 mengalami peningkatan.
6. Di bidang kesehatan Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan baik peningkatan sarana dan prasarana maupun jumlah petugas kesehatan dan persebarannya, namun lokasi daerah sebagian adalah pedesaan dimana akses ke RS atau Puskesmas yang sulit menyebabkan program pelayanan kesehatan agak tersendat, hal ini ditandai dengan Angka kematian bayi yang masih fluktuatif, begitu pula angka kematian ibu. Tahun 2020 AKB sebesar 15,52 dari 1000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 13 kasus..
7. Dalam hal keikutsertaan perempuan dalam program pengendalian penduduk seperti program Bangga Kencana didapatkan 84,87 persen dari wanita yang pernah mengikuti KB dikatakan sebagai peserta aktif selebihnya 26,02 persen tidak lagi ber KB (drop Out). Di Kabupaten Rembang tahun 2021 didapatkan WUS sejumlah 121.960 orang diantaranya 128,034 orang merupakan PUS, sejumlah inilah yang berpotensi meningkatkan jumlah penduduk dimasa mendatang, sehingga perlu penanganan lebih lanjut.
8. Peran serta perempuan dalam program KB tak diragukan lagi, seperti disebutkan data DINSOSPPKB Kabupaten Rembang peserta KB dengan alat/cara suntik mencapai 76,03 persen, cara susuk 8,96 persen, pasang pil mencapai 9,30 persen, AKDR dan lainnya sebesar 2,85 persen.



9. Tingginya persentase perempuan dalam angkatan kerja mengindikasikan semakin meningkatnya *double house hold* yang berarti didalam rumah tangga baik suami dan istri bekerja untuk penghasilan keluarga. Angka TPAK perempuan tahun 2020 sebesar 51,17 persen dapat dikatakan sudah cukup tinggi, walaupun masih dibawah TPAK laki-laki sebesar 79,46 persen. Dilihat dari persebaran pekerja perempuan dalam lapangan usaha, perempuan hampir merata di semua sektor walaupun masih sedikit, bahkan pada sektor industri dan perdagangan pekerja perempuan lebih besar dibanding pekerja laki-laki.
10. Di sektor publik peran serta kaum perempuan belum begitu nyata. Hal ini disebabkan kurangnya kesempatan bagi kaum perempuan yang diberikan baik dalam bidang politik, legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Secara umum kaum perempuan banyak menempati posisi sebagai fungsional seperti di bidang kesehatan dan pada bidang pendidikan.
11. Kekerasan yang terjadi pada perempuan semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya kadang bersifat terbuka. Data yang tercatat pada unit pelayanan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Semai RWC3 di tahun 2020 telah terjadi 9 kasus kekerasan terhadap perempuan diantaranya, 6 kasus kekerasan fisik, 2 kekerasan seksual dan 2 kekerasan psikologis, sedangkan kekerasan pada anak sebanyak 13 kasus diantaranya 3 kekerasan fisik dan 10 kekerasan seksual.



10.2 Saran

1. Peran suatu dinas/instansi dalam penyusunan satatistik dan analisis gender masih perlu ditingkatkan, karena dinas/instansi lebih mengetahui sebab terjadinya bias gender.
2. Pembentukan focal point dan pembatasan data pilah di semua SKPD sebagai penyusunan analisis gender.
3. Berdasarkan analisis pada lingkungan dinas/instansi mampu mengusulkan program untuk mengatasi bias gender yang ada.
4. Kebijakan dibidang pendidikan antara lain :
 - a. Peningkatan jumlah siswa penerima beasiswa dari keluarga kurang mampu di tingkat SMA/MA/SMK;
 - b. Peningkatan program sekolah gratis pada jenjang Pendidikan Menengah dan program retrieval bagi siswa SLTA, yaitu rekrutmen penduduk usia SLTA yang tidak melanjutkan untuk bersekolah melanjutkan di SLTA;
 - c. Pengembangan lifeskill (pendidikan kecakapan hidup) berupa praktek ketrampilan bagi siswa SLTA selain kurikulum wajib.
 - d. Melancarkan program Gerakan Ayo Sekolah Pol 12 (Gaspol -12)
5. Kebijakan dibidang ekonomi
 - a. Penumbuhan dan meningkatkan usaha ekonomi perempuan.
 - b. Perlindungan pada pekerja khususnya pekerja perempuan.
6. Kebijakan di sektor publik
 - a. Pembentukan kaukus perempuan;
 - b. Pendataan dan pembinaan pada organisasi perempuan.
7. Kebijakan perlindungan perempuan dan anak, antara lain:
 - a. Pemberian ruang yang aman dan layak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - b. Pembuatan sarana dan prasarana serta aturan yang jelas dalam pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.